

# EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN ANAK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KAMPUNG ANAK NEGERI DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA

**Silvia Ayu Ariyanti**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[silviaariyanti@mhs.unesa.ac.id](mailto:silviaariyanti@mhs.unesa.ac.id)

**Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[prabawatiindah@yahoo.co.id](mailto:prabawatiindah@yahoo.co.id)

## **Abstrak**

Keberadaan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial di negara ini menjadi permasalahan yang kompleks. Jumlahnya yang setiap tahun mengalami peningkatan, patut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah kota Surabaya membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya yang berada dalam naungan Dinas Sosial Kota Surabaya yang bertugas memberikan pelayanan dan pembinaan bagi anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berada di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pembinaan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subyek penelitian terdiri dari Kepala UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya, tenaga pembina, tenaga pendamping, tenaga administrasi, dan beberapa anak asuh UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sumber data sekunder sedangkan untuk teknik analisis datanya menggunakan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan, *pertama*, pendekatan yang dilakukan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya yaitu dengan melalui pendekatan kekeluargaan. Artinya, dalam pendekatan ini seorang petugas di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya bersikap bahwa anak-anak ini telah menjadi ikatan keluarga yang harus dibina dan dibimbing oleh semua pengurus UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. *Kedua*, bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya antara lain bimbingan mental spiritual, kedisiplinan, jasmani, sosial, minat, dan kognitif. *Ketiga*, dengan adanya pembinaan ini nampak sekali perubahan yang terjadi pada kepribadian mereka. Perubahan ini dapat dilihat dari mereka yang sudah mempunyai arah dan tujuan hidup, mulai hidup mandiri, hidup bersih, rapi, dan mulai mengatur cara berbicara. *Keempat*, dampak positif yang diterima oleh anak asuh di UPTD Kampung Anak Negeri sejauh ini adalah timbulnya kesadaran anak-anak dalam perilaku seperti lebih mandiri dan selain itu juga memberikan masa depan setara dengan anak-anak lainnya. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya sudah mencapai target yang di harapkan.

**Kata Kunci: Evaluasi, Program, Kesejahteraan Sosial**

## **Abstract**

The existence of children with social welfare problems in this country is a complex problem. The number that increases every year, deserves serious attention from the government. Therefore, the Surabaya city government formed the Surabaya City Children's Technical Implementation Unit (UPTD) which is under the auspices of the Surabaya City Social Service in charge of providing services and guidance for children with social welfare problems in the city of Surabaya. This study aims to describe the development of children with social welfare problems in the UPTD of Surabaya City Children's Village. This research is a qualitative research. The subjects of the study consisted of the Head of UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya, supervisors, assistants, administrative staff, and a number of foster children UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya The technique of collecting data was conducted by conducting observations, interviews, and documentation. The data sources used are primary sources and secondary

data sources while for data analysis techniques use data collection, data presentation, data reduction, and conclusion drawing. From the results of the research conducted, it can be concluded, first, the approach taken in the UPTD of Kampung Anak Negeri Kota Surabaya is through a family approach. That is, in this approach an officer in the UPTD of the Surabaya City Children Village behaves that these children have become a family bond that must be nurtured and guided by all UPTD Surabaya City Children. Second, the forms of coaching carried out in the UPTD of the Kampung Anak Negeri in Surabaya include spiritual, disciplinary, physical, social, interest, and cognitive mentoring. Third, with this formation, it seems that the changes in their personality are very apparent. This change can be seen from those who already have the direction and purpose of life, begin to live independently, live clean, neat, and begin to regulate how to talk. Fourth, the positive impact received by foster children in the UPTD Kampung Anak Negeri so far is the emergence of awareness of children in behaviors such as being more independent and besides that also giving the future equal to other children. So in general it can be concluded that the implementation of the social welfare program in the UPTD of the Surabaya City Children's Village has reached the expected target.

**Keywords: Evaluation, Program, Social Welfare**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai populasi penduduk yang sangat padat terutama di kota-kota besar. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk Badan Pusat Statistik Jumlah Penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa dan peringkat ke 4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia sebagaimana dikutip ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses pada 06 September 2018) Dengan jumlah penduduk yang sangat padat tersebut, dapat memicu timbulnya peningkatan jumlah pengangguran, kemiskinan, keterlantaran, sehingga akhirnya timbul masalah sosial.

Masalah sosial dapat dibedakan dengan masalah kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial merupakan bagian dari masalah sosial. Sebagai ilustrasi, kemiskinan merupakan masalah utama yang terbentang dalam domain masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial. Namun, secara khusus masalah kemiskinan, kemudian menyentuh dimensi kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial menurut Friendler dalam Fahrudin (2018:9) adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. Contoh kesejahteraan sosial meliputi: fakir miskin, orang dengan kecacatan (ODK), anak dan lansia telantar, dan rumah tidak layak huni. Populasi yang mengalami problema ini dikenal dengan istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Di kota besar seperti di Kota Surabaya sekarang masih banyak permasalahan kesejahteraan sosial yang masih didominasi oleh permasalahan terutama kemiskinan, keterlantaran, dan penyimpangan perilaku. Keberadaan mereka adalah suatu fenomena yang didalamnya terdapat berbagai permasalahan yang kompleks dan harus segera ditangani. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dimaksud disini menurut Permensos Nomor 08 Tahun 2012 adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang

sedang mengalami hambatan, kesulitan atau gangguan, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. PMKS sendiri terdiri dari anak terlantar, gelandangan, pengemis, pemulung, penyandang disabilitas, anak jalanan, serta orang tua (lansia) terlantar.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Surabaya jumlah hasil PMKS sendiri yaitu pada tahun 2016 terdapat 56.883 Jiwa, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 4.491 Jiwa, pada bulan Januari sampai Agustus 2018 mengalami peningkatan menjadi 55.653 Jiwa. Dilihat dari data tersebut menunjukkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial sendiri tidaklah sedikit.

**Tabel 1**  
**Jumlah PMKS di Kota Surabaya**

No	Tahun	Jumlah
1.	2016	56.883
2.	2017	41.491
3.	Januari s/d Agustus 2018	55.653

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2018

Dari beberapa PMKS sendiri yang patut diamati secara serius adalah fenomena anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Hal ini dirasa sangat penting karena keberadaan mereka semakin mengkhawatirkan, dan tak jarang sering kali ada berita tentang maraknya anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial ini melakukan tindakan yang tidak sepatutnya, seperti halnya dikutip dalam koran online ([www.detiknews.com](http://www.detiknews.com) diakses pada 06 September 2018), terdapat suatu berita dengan judul "Bocah DS Kembali Mencuri KPAI Minta Pertanggungjawaban Dinsos", yang memberitakan tentang anak yang ditinggal ibu kandungnya sejak usia tiga tahun, sejak kecil, DS diasuh oleh pedagang keliling, namun dia termasuk bocah yang nakal. Sejak kecil DS sering kabur dari rumah dan berkelahi atau mencuri, ketika ditanya katanya sering dipukulun akhirnya melawan, mencuri karena tidak diberi uang jajan. Orang tua asuh DS menyerah dan meminta agar DS diambil oleh pemerintah, hal ini menunjukan betapa gampangya anak-anak PMKS nekat secara hukum untuk memenuhi kebutuhannya.

Pengertian anak-anak PMKS disini adalah anak-anak yang terdiri dari anak jalanan, anak nakal, dan anak terlantar. Mereka merupakan kelompok sosial yang sangat rentan dari berbagai tindakan kekerasan baik fisik, emosi, seksual maupun kekerasan sosial. Selain itu, lingkungan juga sangat mempengaruhi kepribadian dan perilaku sosial anak penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga perlu adanya suatu tempat untuk membina mereka karena pada dasarnya anak-anak ini bisa diarahkan dan diatur mengingat umur mereka sangat muda, kedepannya diharapkan anak-anak ini dapat berkembang kearah yang lebih baik lagi dari sebelumnya (Kalimasada, 2015:1).

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Surabaya jumlah hasil anak PMKS sendiri yaitu pada tahun 2016 terdapat 1.136 Jiwa, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 1.163 Jiwa, pada bulan Januari sampai Agustus 2018 mengalami peningkatan menjadi 2.576 Jiwa. Dilihat dari data di atas menunjukkan jumlah anak PMKS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sehingga Dinas Sosial Kota Surabaya harus terus melakukan upaya untuk menekan jumlah anak PMKS dan memberikan pembinaan agar anak tidak lagi turun ke jalanan. Hal itu menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kota Surabaya, terlebih lagi bagi Dinas Sosial Kota Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan anak PMKS. Selain mengganggu ketertiban di tempat-tempat umum, keberadaan mereka kadang juga meresahkan masyarakat.

Dalam mengatasi fenomena ini maka dibutuhkan pembinaan dari pemerintah sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat 1 ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Hak-hak asasi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial pada hakekatnya sama dengan hak asasi manusia pada umumnya seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang “Konvensi Tentang Hak-Hak anak”.

Pembinaan sangat dibutuhkan bagi mereka anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial, karena mau tidak mau anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah juga penerus dan pemuda harapan bangsa. Dengan kata lain pembinaan adalah salah satu kunci untuk membenahi pola perilaku mereka dan menjadikan mereka lebih baik lagi sesuai dengan yang diharapkan (Kalimasada, 2015:3).

Untuk mencegah anak-anak ini tidak semakin terjerumus dalam perilaku yang patologis, dan memiliki kecenderungan berkonflik dengan hukum maka Pemerintah Kota Surabaya membentuk sebuah Pondok Sosial Anak Wonorejo pada tahun 2009, pada tahun 2011 berganti nama menjadi Panti Rehabilitasi Sosial Anak Wonorejo, kemudian pada tahun 2012 diganti dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri berdasarkan Perwali No. 61 tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana

Teknis Dinas Kampung Anak Negeri, pada tahun 2016 UPTD Pondok Sosial Kalijudan dan UPTD Kampung Anak Negeri dimerger menjadi satu yaitu UPTD Pondok Sosial Kalijudan dan Kampung Anak Negeri dengan terbitnya Perwali no 93 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan dan Kampung Anak Negeri, di tahun ini terbit Perwali baru yang merubah nomenklatur yaitu Perwali No. 55 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD Kampung Anak Negeri, sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak bermasalah secara sosial di kota Surabaya. (Sumber: UPTD Kampung Anak Negeri, 2018).

Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki empat program yaitu program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, program pelayanan administrasi perkantoran dan program pelayanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dan untuk menangani masalah kesejahteraan sosial masuk dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial dimana dalam program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial ini terdapat beberapa kegiatan salah satunya adalah kegiatan peningkatan pemberdayaan sosial keluarga miskin melalui rehabilitasi sosial daerah kumuh dimana dalam kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Surabaya dalam memberdayakan keluarga miskin dan melakukan rehabilitasi terhadap daerah kumuh. Penanganan anak PMKS masuk dalam kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PMKS di UPTD Kampung Anak Negeri dengan rincian kegiatan berupa pelayanan bimbingan, pemenuhan kebutuhan dasar permakanan, pengadaan perlengkapan, operasional UPTD, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan perlengkapan olah raga dan kesenian, penyediaan jasa komunikasi, air, listrik dan surat kabar, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyediaan jasa pelayanan bagi anak PMKS yang berada di UPTD Kampung Anak Negeri yang kemudian dijabarkan oleh UPTD Kampung Anak Negeri menjadi kegiatan pemenuhan kebutuhan pangan, pemenuhan kebutuhan sandang, pemenuhan kebutuhan papan, bimbingan mental spriritual, bimbingan mental perilaku, bimbingan keterampilan, dan bimbingan minat/ bakat dan intelektual.

Dari hasil observasi awal peneliti di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya, jumlah klien di sini berjumlah 35 klien dengan daya tampung 35 klien. Prosedur rekrutmen dilakukan pihak UPTD Kampung Anak Negeri dengan cara mendapatkan klien dari hasil razia dan penjangkauan, setelah itu akan dilakukan proses kegiatan identifikasi dan seleksi yang dilaksanakan dengan melibatkan tenaga dokter, psikolog, petugas administrasi, dan pendamping calon klien sebagaimana merujuk pada data yang diberikan pihak UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya.

Pembinaan di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya berlangsung selama usia anak tidak lebih dari 18 tahun, dan terdapat sistem tahapan yang harus dilalui para klien yakni tahapan *pertama* adalah *assesment*

(penelaahan permasalahan klien), *kedua* orientasi (pengenalan program UPTD kampung anak negeri dan lingkungan UPTD kampung anak negeri), *ketiga* intervensi (pembinaan yang akan diberikan kepada klien baik pendidikan dan keterampilan yang meliputi bimbingan mental, bimbingan jasmani, bimbingan sosial, bimbingan minat, dan bimbingan kognitif) *keempat* teminasi (selesainya pendampingan).

Meskipun program pelayanan kesejahteraan sosial ini telah diterapkan namun pada kenyataannya masih terdapat masalah yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. Hal ini berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya dimana dari bulan Januari hingga Agustus 2018 terdapat sebagian anak asuh yang berada di UPTD Kampung anak Negeri Kota Surabaya melanggar peraturan dan melakukan perilaku menyimpang. Dilihat dari data berikut menunjukkan bahwa masih banyak anak jalanan yang melanggar peraturan dan masih ada yang melakukan tindakan menyimpang.

**Tabel 2**  
**Bentuk-Bentuk Pelanggaran Anak Asuh**

No	Bentuk Pelanggaran	Jumlah
1.	Kabur dari panti	5
2.	Mencuri	1
3.	Berkelahi	Hampir Semua
4.	Pelanggaran Disiplin	10
5.	Merokok	6

Sumber: UPTD Kampung Anak Negeri, 2018

Adanya program pelayanan ini diharapkan untuk menyempurnakan program pelayanan yang belum terlaksana dengan baik pada tahun 2015 dan bertujuan agar anak penyandang masalah kesejahteraan sosial memiliki bekal untuk terjun kembali ke masyarakat. Kebijakan publik menurut Dye dalam Subarsono (2005:49) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik adalah serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintahan.

Evaluasi kebijakan sangat penting untuk dilakukan guna mengetahui apakah suatu kebijakan sudah mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan atau belum dalam suatu kebijakan. Program pelayanan kesejahteraan sosial sampai saat ini berjalan 10 (sepuluh) tahun dilaksanakan di Kota Surabaya, peneliti tertarik untuk melakukan studi evaluasi kebijakan dengan teori evaluasi Bridman & Davis (*Input, Process, Outout, Outcomes*) karena dapat digunakan untuk mendeskripsikan tentang lingkungan program, kegiatan kegiatan yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri, serta mendeskripsikan hasil kebijakan dihasilkannya adanya program pelayanan kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri, beserta sejauh mana tujuan dari kebijakan tercapai.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah teori evaluasi menurut Bridman & Davis (Tayibnapis dalam

Fesdyanda, 2012:32). Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:247) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan analisis evaluasi program pembinaan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya dengan menggunakan teori evaluasi menurut Bridman & Davis (Tayibnapis dalam Fesdyanda, 2012:32). Teori evaluasi menurut Bridman & Davis ini meliputi *Input, Process, Outout, Outcomes*. Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut:

### 1. *Input*

Sumber daya adalah semua potensi yang dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumber daya disini meliputi para staff dan juga klien yang berada di UPTD Kampung Anak Negeri. Ketersediaan sumber daya manusia yang kurang dibanding dengan volume kerja kepala dan perangkatnya juga diakui oleh kepala UPTD Kampung Anak Negeri terutama di tenaga pendamping yang mendampingi anak-anak 24 jam mereka terbagi dalam 3 shift, satu shift 8 jam. Tugas pendamping adalah mendampingi mendampingi segala kebutuhan yang berhubungan dengan anak-anak, selain itu juga tugas pendamping adalah untuk mengkondisikan anak-anak. Tenaga pendamping harus ada jam-jam tertentu yang sudah dibuat UPTD Kampung Anak Negeri, maksudnya pendamping harus mengikuti randoun yang sudah dibuat. kalau dikatakan kurang pastinya kurang karena satu shift pendamping harus mengkondisikan anak yang berjumlah 35.

Meskipun tidak ada syarat khusus menjadi staff di UPTD Kampung Anak Negeri tetapi sumber daya manusia yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri sangat berkompeten dalam pembinaan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Surabaya. Dengan melihat latar belakang pendidikan staff UPTD Kampung Anak Negeri yang berpendidikan Sarjana, Magister dan Doktor maka sangat mudah bagi mereka untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini memperkuat bahwa sumber daya manusia yang mendukung terlaksananya program pembinaan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial tergolong baik.

Dalam pelaksanaannya bahwa petugas-petugas di UPTD Kampung Anak Negeri dalam memberikan pelayanan untuk anak-anak yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak dan pastinya juga harus totalitas dan tentunya tidak adanya perlakuan berbeda dari petugas di UPTD Kampung

Anak Negeri dalam menangani anak-anak dalam artian mereka memperoleh perlakuan sama dari setiap petugas.

Pendekatan yang dilakukan di UPTD Kampung Anak Negeri terhadap anak binaan merupakan suatu usaha dalam memberikan pelayanan terbaik, khususnya bagi anak binaan yang mengalami trauma atau sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar UPTD Kampung Anak Negeri.

Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kota Surabaya. Besaran anggaran dan rinciannya tidak diketahui secara pasti, akan tetapi dari website [eproject.surabaya.go.id](http://eproject.surabaya.go.id) terdapat data yang menyebutkan bahwa selama tahun 2018 akan diadakannya upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi anak PMKS di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya, besaran anggaran tersebut adalah Rp 1.407.838.856. Dana yang didapatkan diolah sebagaimana mestinya dan caranya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, meskipun masih terbilang minim dan belum maksimal. Selain itu adanya kesulitan untuk memperkirakan kebutuhan anggaran yang diperlukan karena anggaran yang telah dialokasikan tidak mencukupi dan harus menunggu perubahan anggaran atau harus menunggu tahun anggaran berikutnya.

Sumber daya pendukung juga merupakan faktor penting dalam melaksanakan program. Tanpa adanya fasilitas pendukung maka program tersebut tidak akan berhasil. Sumber daya pendukung yang dimaksudkan disini adalah sarana dan prasarana atau fasilitas yang terdapat di dalam UPTD Kampung Anak Negeri yang berguna untuk mendukung berlangsungnya program.

Beberapa sarana dan prasarana yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri belum dapat dikatakan cukup untuk memenuhi standar dalam mewujudkan program kesejahteraan sosial. Ada beberapa yang masih kurang karena terbatasnya lahan seperti ruang belajar dan sarana olahraga yang dirasa penting untuk kegiatan anak-anak. Maka upaya yang dilakukan UPTD Kampung Anak Negeri dalam memenuhinya adalah dimintakan di anggaran berikutnya.

UPTD Kampung Anak Negeri sendiri merupakan bangunan dengan luas tanah **2.350 m<sup>2</sup>**, dan luas bangunan **889 m<sup>2</sup>** yang terdiri dari : kantor, aula, dapur, ruang tidur (4 unit), musholla, ruang pembina, ruang perpustakaan, ruang balap sepeda, ruang lukis, ruang konseling, ruang lukis, ruang music, kamar mandi.

## 2. *Process*

Pada aspek ini, berisi tentang bagaimana kebijakan yang di transformasikan menjadi sebuah program. Dalam pelaksanaannya prosedur rekrutmen anak asuh di UPTD Kampung Anak Negeri adalah menerima calon anak asuh berdasarkan hasil razia atau bisa juga diserahkan secara sukarela dengan disertai persyaratan yaitu penduduk kota Surabaya, berasal

dari keluarga tidak mampu, berusia 8 s/d 18 tahun, belum menikah dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. jumlah dan ketepatan sasaran penerima pelayanan, secara jumlah, penerima manfaat yang ada belum dikatakan mencukupi karena berdasarkan data yang ada di Dinas Sosial Kota Surabaya sendiri jumlah anak PMKS di Kota Surabaya dapat dikatakan banyak sedangkan untuk kuota yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya yaitu sejumlah 35 anak. Kelompok sasaran (*target group*) merupakan individu, masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijakan atau program. Berkaitan dengan ketepatan sasaran, dimana sasaran garapan yaitu anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar. Berdasarkan SOP dari UPTD Kampung Anak Negeri bahwa prosedur untuk menerima klien adalah harus warga Surabaya, harus terlantar, harus warga miskin. prosedur penerimaan di UPTD Kampung Anak Negeri berdasarkan SOP yang sudah dibuat, namun masih terdapat kekurangan bahwa yang mana seharusnya diperuntukan bagi warga Surabaya tetapi mayoritas anak asuh yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri berasal dari luar kota Surabaya.

Program pembinaan pada UPTD Kampung Anak Negeri terfokus pada program pemberdayaan. Program ini diharapkan dapat memperbaiki perilaku dan masa depan anak PMKS dengan mengutamakan faktor perbaikan moralitas. Menurut Pimpinan UPTD Kampung Anak Negeri saat ditemui mengatakan, Program ini direalisasikan melalui beberapa tahapan diantaranya :

*Pertama*, Pada tahap assessment UPTD Kampung Anak Negeri mengidentifikasi anak berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan anak asuh, baik kebutuhan fisik, sosial, maupun psikis, serta menggali informasi mengenai kemungkinan potensi yang dimiliki oleh anak asuh.

*Kedua*, pada tahap orientasi UPTD Kampung Anak Negeri Pada tahapan ini dilakukan dalam bentuk pengenalan program UPTD Kampung Anak Negeri dan lingkungan UPTD Kampung Anak Negeri.

*Ketiga* tahap intervensi UPTD Kampung Anak Negeri mulai melaksanakan pendampingan yang telah dipersiapkan pada langkah sebelumnya. Anak mulai mendapatkan pendampingan, baik pada pendidikan dan berdasarkan pembagian pendampingan yang telah dilakukan.

*Keempat* yaitu tahap terminasi atau pengakhiran pendampingan ini merupakan selesainya pendampingan yang dilakukan pihak UPTD Kampung Anak Negeri pada anak asuh. Pada tahapan ini, UPTD Kampung Anak Negeri mempunyai hak untuk melakukan pengakhiran pendampingan melalui berbagai pertimbangan, yakni anak sudah normatif, kembali kepada keluarganya, sudah bekerja, atau berumur lebih dari 21 tahun keatas.

Adapun kendala atau hambatan yang UPTD Kampung Anak Negeri alami adalah : *Pertama*, anak asuh itu cuek dengan keadaan sehingga apapun yang

dikatakan oleh petugas seakan tidak ada artinya dan diabaikan. *Kedua*, kehidupan anak asuh berbeda sekali dengan anak rumahan yang masih dalam pengawasan orang tuanya. Kehidupan mereka itu jauh dari pengawasan orang tuanya. *Ketiga*, anak asuh susah untuk diatur dan maunya sendiri. Sehingga ketika dinasehati tidak mengikutinya. Untuk mengatasi kendala yang ada disini, solusi yang dilakukan oleh pihak UPTD Kampung Anak Negeri adalah dengan terus berbenah diri dan melakukan koordinasi bagaimana cara meminimalisir kendala yang terjadi

Pembahasan selanjutnya adalah pihak yang terlibat dalam pembinaan di UPTD Kampung Anak Negeri pertama adalah, Dinas Sosial kota Surabaya sebagai lembaga pemerintah yang menaungi UPTD Kampung Anak Negeri memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung proses pembinaan di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya. Peran tersebut adalah berupa anggaran dari APBD melalui Dinas Sosial kota Surabaya untuk fasilitas serta kebutuhan UPTD Kampung Anak Negeri dalam proses pembinaan. Kedua adalah, seluruh staff yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri beserta instruktur-instruktur yang didatangkan dari luar. Ketiga adalah, Donatur dari luar.

Adanya proses pembinaan anak PMKS dan di UPTD Kampung Anak Negeri tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Seperti dalam kehidupan, problematika yang di temui bukanlah menjadi hal yang baru lagi, dan juga pasti ada dukungan yang membuat sesuatu ini bisa dicapai. Salah satu faktor pendukung yakni masih adanya motivasi untuk belajar dari anak dan bantuan dari luar baik itu berupa moril maupun materiil. Sedangkan untuk faktor penghambat adalah kemandirian anak binaan dan keluarga.

### 3. *Output*

UPTD Kampung Anak Negeri memiliki beberapa peran dalam mengentaskan permasalahan anak asuh. Dalam perannya, UPTD Kampung Anak Negeri memiliki banyak program yang dapat membentuk karakter anak PMKS yang dipandang negatif oleh masyarakat menjadi karakter yang baik dan dapat diterima di tengah masyarakat luas. Peran yang dimiliki oleh UPTD Kampung Anak Negeri salah satunya adalah pembinaan. Pembinaan sendiri adalah merupakan suatu pondasi awal dari terciptanya suatu karakter dari seorang anak. Untuk menunjang pembinaan bagi anak asuh peran UPTD Kampung Anak Negeri sangat berpengaruh karena tujuan utama UPTD Kampung Anak Negeri adalah untuk mengentaskan anak PMKS dan membentuk karakter anak menjadi lebih baik.

Evaluasi hasil adalah salah satu cara untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan. Dalam evaluasi hasil ini, penulis menggunakan tolak ukur perubahan perilaku anak setelah bergabung di UPTD Kampung Anak Negeri. Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial di UPTD

Kampung Anak Negeri ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan menumbuhkan semangat hidup bagi anak-anak. UPTD Kampung Anak Negeri juga diharapkan bisa menjadi tempat bernaung bagi anak-anak PMKS untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak yang biasa menghadapi kerasnya hidup. Selain itu, program di UPTD Kampung Anak Negeri juga memberikan keterampilan, kepercayaan diri dan keberanian pada anak-anak yang akan bermanfaat ketika mereka sudah besar nanti.

Menjadi manusia yang lebih baik merupakan impian semua orang. Namun, ketika melihat keberadaan anak PMKS di sekitar kita saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Banyak orang menganggap bahwa anak PMKS suka bikin resah masyarakat, mabuk, dan lain-lain. Mereka menganggap perilaku yang dilakukan itu seakan tidak dapat dihilangkan dan akan menjadi identitas mereka. Padahal, kalau kita perhatikan perilaku seperti itu masih bisa kita rubahkannya menjadi lebih baik lagi. Kita dapat rubahkannya dengan melalui pembinaan-pembinaan seperti yang dilakukan oleh UPTD Kampung Anak Negeri.

Indikator dalam perubahan pada diri anak PMKS selama ini yang dilakukan oleh UPTD Kampung Anak Negeri tidak secara eksplisit ditentukan. Tetapi paling tidak yang menjadi ukuran bahwa pembinaan dan pendidikan itu mulai berhasil ketika anak-anak sudah mulai mandi dengan teratur, menjaga kebersihan dirinya. Karena bagian dari tahapan perubahan pada diri anak asuh itu memang dari tahap mandi, berpakaian yang rapi, bersih-bersih, dan mulai mengatur cara berbicara.

Adanya proses pembinaan anak PMKS dan di UPTD Kampung Anak Negeri tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Seperti dalam kehidupan, problematika yang di temui bukanlah menjadi hal yang baru lagi, dan juga pasti ada dukungan yang membuat sesuatu ini bisa dicapai. Salah satu faktor pendukung yakni masih adanya motivasi untuk belajar dari anak dan bantuan dari luar baik itu berupa moril maupun materiil. Sedangkan untuk faktor penghambat adalah kemandirian anak binaan dan keluarga.

### 4. *Outcomes*

Outcomes merupakan dampak dari hasil program yang telah diberikan. Apakah dampak dari program tersebut dapat dirasakan oleh anak asuh maupun orang-orang di sekitarnya. Hal itu pun diungkapkan oleh anak-anak yang mengaku adanya perubahan sikap pada dirinya dan juga prestasi di sekolahnya. Selain itu ada beberapa alumni di UPTD Kampung Anak Negeri sudah bekerja dan ada beberapa yang terlihat mengunjungi anak-anak yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri selain menyambung silaturahmi kepada penghuni UPTD Kampung Anak Negeri tetapi juga memberikan motivasi terhadap anak-anak di UPTD Kampung Anak Negeri.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Evaluasi Program Pembinaan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya dari pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, pendekatan yang dilakukan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya yaitu dengan melalui pendekatan kekeluargaan. Kedua, bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya antara lain bimbingan mental spiritual, kedisiplinan, jasmani, sosial, minat, dan kognitif. Ketiga, dengan adanya pembinaan ini nampak sekali perubahan yang terjadi pada kepribadian mereka. Keempat, dampak positif yang diterima oleh anak asuh di UPTD Kampung Anak Negeri sejauh ini adalah timbulnya kesadaran anak-anak dalam perilaku seperti lebih mandiri dan selain itu juga memberikan masa depan setara dengan anak-anak lainnya.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran terkait Evaluasi Program Pembinaan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya yaitu sebagai berikut:

1. Bimbingan keterampilan di UPTD Kampung Anak Negeri agar menambah variasi jenisnya, sesuai minat dan bakat anak PMKS.
2. Perlu adanya penambahan daya tampung yang lebih luas yang digunakan untuk membina anak PMKS agar bisa menampung lebih banyak, Mengingat hasil yang telah dicapai di UPTD Kampung Anak Negeri sudah banyak mengentaskan anak-anak PMKS.
3. Selain itu untuk Dinas Sosial Kota Surabaya diaharapkan memberikan perhatian berupa penambahan sumber daya manusia ataupun dana kepada pihak UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya

### Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing.
3. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. dan Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A. selaku dosen penguji.
4. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
5. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- detikNews. 2013. *Bocah DS Kembali Mencuri KPAI Minta Pertanggungjawaban Dinsos*. (online), (<https://m.detik.com/news/berita/d2309317/bocah-ds-kembali-mencuri-kpai-minta-pertanggungjawaban-dinsos> diakses pada tanggal 6 September 2018)
- Fahrudin, Adi. 2018. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fesdyanda, Dimas Irfan. 2012. *Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri Setara Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. (online). (<http://media.neliti.com> diakses pada tanggal 6 September 2018)
- Kalimasada, Mas Dinar Angka Wijaya. 2015. *Pembinaan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara. (online). (<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index/php/publika/article/view/10370> diakses pada tanggal 6 September 2018)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990. *Tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 08 Tahun 2012. *Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Peraturan Walikota Surabaya No. 55 Tahun 2018. *Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya*. Surabaya: Walikota Surabaya.
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. *Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.